

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 April 2017/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI
SUB UNIT KERJA : BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Sarip Hidayat**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PENGUJ I DAN PENANDA TANGAN SPM (PPSPM)**
3. NHK : **403180**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	735.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/- m2 di DEPOK, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/56 m2 di DEPOK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m2/- m2 di DEPOK, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	35.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MICRO/MINI BUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	26.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	464.236.228
F. HARTA LAINNYA	Rp.	50.000.000
Sub Total	Rp.	1.311.036.228
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.311.036.228

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 Mei 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.